

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKATAHUN 2022
SESUAI PERUBAHAN RENSTRA

NO	TUJUAN OPD	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA			SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA			NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA			NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA			NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA			KET	
			2021	2022	2023			2021	2022	2023				2021	2022	2023				2021	2022	2023				2021	2022	2023		
(1)						(2)	(3)	(4)		(1)	(2)	(3)	(4)		(1)	(2)	(3)	(4)		(1)	(2)	(3)	(4)							
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	54,02	55,22	56,42	1.Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,09	2,25	2,9	(1)	PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Implementasi tata kelola SPBE	2,1	2,12	2,3	(1)	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	e-jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	16	18	20	1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	16	18	20		
												Indeks Implementasi Layanan SPBE	2,55	2,55	2,55										Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	16	18	20		
																						2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	7	7	7			
																								Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	1	1			
										(2)	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sitem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital	67	89	100	(1)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan	1	1	1	1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan	24	24	24			

											nilai indeks KAMI			375								Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1				
3						2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	92,32%	93%	94%	(1)	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	37,6%	45%	50%	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata kunjungan masyarakat pada laman resmi korinfo padang panjang	76.000	80.000	85.000	(1)	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten videotron	750	800	850	
																							Jumlah OPD yang sudah mengelola informasi publik	18	22	24			
																							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	1	1			
																							2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	800	900	1000	
																							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	1	1			
																							3	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5	5	5	
																							Jumlah pertemuan jumpa pers	8	8	8			
																							Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	2	2	2			
																							Jumlah Layanan Hubungan Media	5	5	5			
																							4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang aktif	2	2	2	
																							Jumlah konten positif	20	20	20			

																						Jumlah media tradisional yang dibina	1	1	1			
																						Jumlah pelatihan bahokumas yang diadakan	0	1	0			
																						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	1	1			
4					3. Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi	58,33%	83%	100%	(1)	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	2	3	3	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	2	3	3	
											Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun laporan pembangunan daerah	100	100	100								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	1	1			
																						2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan	1	1	1	
																						Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	24	24	24			
2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur berkelanjutan				Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo	86	87	88	(1)	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Implementasi tata kelola SPBE	2,1	2,12	2,15	(1)	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	16	18	20	1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	16	18	20	
												Indeks Implementasi Layanan SPBE	2,55	2,55	2,55								Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	16	18	20		

